

BAB IV

KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES DAN HIDUP “MENEGARA” MENURUT NIKOLAS DRIYARKARA

4.1 Negara

4.1.1 Pengertian Negara

Manusia membutuhkan negara dalam mempertahankan keberadaannya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial mendorong dia menjalin hidup bersama dengan orang lain. Hal ini tampak dalam koloni hidup bersama yang dibangun oleh individu-individu insani. Asosiasi hidup bersama tersebut dimulai dari unit yang paling kecil (rumah tangga atau keluarga) hingga kelompok besar (negara). Negara termasuk dalam organisasi manusia yang bersifat politis. Di bawah ini akan diterangkan pemahaman atau pengertian mengenai negara.

Pada bagian ini, penulis akan mencantumkan pengertian umum dari negara. “Negara bisa secara ringkas diterangkan sebagai komunitas politik yang independen (atau berdaulat). Secara lebih lengkap, negara didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki batas-batas geografis, yang dianugerahi kekuasaan tertinggi untuk menegakkan kesejahteraan umum semua orang”.¹ Selanjutnya, Aristoteles memiliki pandangan yang khas tentang “negara kota” (*polis*). Menurut dia, negara tidak hanya menyangkut lingkup geografis tetapi lebih sebagai asosiasi manusia yang membentuk sebuah koinonia. Pemikiran Aristoteles tentang negara sebagai suatu wadah untuk mencapai kebaikan tertinggi dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul “Politik”.

Pengamatan menunjukkan kepada kita, pertama, bahwa setiap kota (*polis*) adalah suatu spesies asosiasi, dan kedua, bahwa semua asosiasi ada demi kebaikan tertentu-karena semua orang melakukan semua tindakannya dengan maksud untuk mencapai sesuatu

¹ Karl-Heinz Peschke, *Etika Kristiani: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, (Maumere: Ledalero, 2003), hal. 64.

yang ia pandang baik. Oleh karena itu, jelaslah bahwa semua asosiasi ditujukan untuk suatu kebaikan, dan bahwa asosiasi khusus, yang paling tinggi dari segala asosiasi dan mencakup semua asosiasi lainnya, akan paling banyak mengejar kebaikan ini, dan dengan demikian, ia akan terarah kepada kebaikan yang paling tinggi dari segala kebaikan. Asosiasi yang paling tinggi dan bersifat inklusif ini ialah kota (atau *polis*), sebagaimana ia disebut, atau asosiasi politis.²

Negara termasuk dalam komunitas politik. Hal ini hendak menegaskan identitas manusia sebagai makhluk politis. Sebagai suatu asosiasi politik, negara dibedakan dari komunitas religius, misalnya gereja. Keduanya merupakan lembaga yang independen. Negara memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dengan komunitas keagamaan (religius). Negara mengurus hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan agama (gereja) mengatur kehidupan rohani manusia.

Negara sering dikenal sebagai “masyarakat sempurna”. Istilah ini hendak menunjukkan bahwa di dalam negara, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat disediakan oleh negara. Negara menjamin kehidupan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa, manusia membentuk negara karena mereka menyadari akan keterbatasan diri mereka dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Atas dasar inilah negara menghadirkan diri sebagai institusi yang mengejawantahkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya akan dibahas tujuan negara.

4.1.2 Tujuan Negara

Aristoteles berasumsi bahwa tujuan didirikannya negara (*polis*) adalah untuk memungkinkan hidup dengan baik. Negara mempunyai tujuan supaya manusia hidup dengan baik dalam arti sepenuh-penuhnya.³ Hal yang sama juga disampaikan oleh Nikolas Driyarkara. Menurut Nikolas Driyarkara, tujuan negara ialah kemakmuran umum. Negara secara langsung melaksanakan kesejahteraan umum.⁴ Kedua filsuf ini mengemukakan hal yang sama mengenai

² Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 1.

³ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, *Op. Cit.*, hal. 201.

⁴ Nikolas Driyarkara, *Negara Dan Bangsa*, *Op. Cit.*, hal. 60.

tujuan negara. Kata kunci yang dipakai oleh keduanya adalah *bonum commune* (kebaikan bersama). Hal inilah yang menjadi tujuan tertinggi yang dikejar oleh manusia pada umumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, horizon pemikiran masyarakat tentang tujuan negara mengarah pada aspek yang sama, yakni kesejahteraan bersama. “Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum (*bonum commune*) politik dan menyeluruh, yang mencakup hal ihwal penegakan keadilan dan ketertiban, pengamanan gejolak dalam negeri, siap siaga menyangkut pertahanan bersama, peningkatan kesejahteraan umum, serta terjamin kebebasan bagi semua orang”.⁵ Kesejahteraan hendaknya dinikmati oleh semua orang. Pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum. Namun dalam penyelenggaraannya, perlu dihindari hal-hal yang hanya menguntungkan seorang warga negara atau golongan tertentu. Dengan lain perkataan, perhatian khusus seyogyanya diprioritaskan kepada orang miskin dan yang kurang beruntung nasibnya.

Negara memiliki dua fungsi utama.⁶ *Pertama*, fungsi penataan. Fungsi ini mengupayakan penegakan dan perlindungan atas tatanan hukum, di mana tatanan tersebut termasuk dalam prasyarat untuk semua kegiatan khas lainnya dari negara. Jikalau fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat tidak mungkin diwujudkan. Di samping itu, kerja sama antarwarga dalam pelaksanaan tugas-tugas bersama tidak akan berjalan. Fungsi ini melingkupi pula tugas pertahanan bersama. *Kedua*, fungsi kesejahteraan. Dengan fungsi kesejahteraan dimaksudkan bahwa negara berkewajiban untuk menggalangkan kesejahteraan di bidang ekonomi, kesehatan, ekologi dan budaya.

Kesejahteraan umum menjadi target utama dari negara. Usaha memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud kepedulian negara terhadap kehidupan para warganya. Meskipun negara berkewajiban untuk memmanifestasikan kebaikan bersama, namun prinsip

⁵ Karl-Heinz Peschke, *Op. Cit.*, hal. 67.

⁶ *Ibid.*

keadilan dan kebebasan masyarakat harus tetap dipertahankan. “Cara negara bertindak di sini adalah subsider”.⁷ Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk mendukung dan menopang segala kemampuan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Walaupun demikian, negara tetap menghargai kebebasan setiap individu dan tidak diperkenankan untuk berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat.

4.2 Negara Menurut Nikolas Driyarkara

4.2.1 Negara Sebagai Aksi Bersama

Eksistensi manusia sebagai *ens socius* merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Hidup manusia senantiasa dibentuk dalam komunitas hidup bersama. Bahkan, keinginan untuk hidup bersama menjadi kebutuhan yang paling fundamental. Hidup bersama dimulai dari tingkat paling sederhana hingga mengarah kepada ruang lingkup yang lebih luas. Kebersamaan itu diwujudkan dalam ada bersama yang lain. Inilah hakekat dasar dari manusia sebagai makhluk sosial.

Kebutuhan akan hidup bersama mendorong manusia membentuk koloni. Komunitas awal yang dibentuk oleh manusia adalah keluarga. Keluarga dilihat sebagai bentuk komunitas yang paling sederhana. Keluarga dibangun oleh dua individu yang berbeda. Dalam hal ini, pria dan wanita memprakarsai hidup bersama melalui rumah tangga. Pria dan wanita memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain, walaupun berada dalam kodrat yang sama. Keduanya membangun hidup bersama untuk mewujudkan esensi mereka sebagai makhluk sosial. Keluarga melahirkan individu-individu baru yang akan membentuk asosiasi hidup bersama dalam lingkup yang lebih luas.

⁷ Norbertus Jegalus, “Hubungan Antara Negara Dan Gereja: Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan”, dalam *Jurnal Ledalero, Wacana Iman Dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013, (Mumere: STFK Ledalero), 221-234, hal. 225.

Individu-individu yang ada di setiap rumah tangga menjalin hidup bersama dengan orang lain. Relasi antarindividu tidak lagi dibatasi oleh hubungan darah, sebagaimana yang terdapat dalam masyarakat primitif. Sebaliknya, manusia modern membina hubungan dengan orang lain di luar kelompoknya. Situasi seperti ini menjadi tanda bahwa pola pikir (*mindset*) manusia sudah memasuki periode peradaban. Dengan kata lain, manusia telah mengenal peradaban dan menerapkannya dalam relasi sosial mereka dengan orang lain. Bahkan, mereka keluar dari habitat aslinya dan membangun suatu komunitas hidup yang lebih maju. Asosiasi hidup seperti inilah yang dikenal dengan istilah 'kota'.

Kota menjelmakan tingkat peradaban manusia. Kota menjadi tolok ukur peradaban suatu kebudayaan. Kota didirikan seiring dengan perkembangan peradaban kebudayaan manusia. Kehidupan kota berada pada level yang lebih tinggi dari masyarakat primitif.

Jika masyarakat manusia mencapai tingkat kebudayaan yang cukup tinggi, maka masyarakat itu membangun kota. Lingkungan kehidupan primitif tidak atau belum mampu mengadakan kota. Kehidupan primitif juga belum membutuhkan suatu fungsi yang dijelmakan dengan mengadakan kota! Dalam lingkungan yang sangat sederhana itu produksi belum menyebabkan ekonomi (atau hanya dalam bentuk yang sangat sederhana), kesatuan belum memerlukan pemerintahan dengan cara yang lebih teknis dan resmi, keadaan umum belum membutuhkan pemusatan, pengaturan, pembagian tenaga dan alat. Kehidupan primitif belum merupakan organisasi yang mengekspresikan diri dengan pembangunan kota.⁸

Kemajuan suatu zaman ditentukan oleh manusia itu sendiri. Demikian pula dengan kemajuan yang dialami oleh suatu komunitas hidup bersama. Kota merupakan salah satu organisasi hidup bersama, di mana individu-individu menjalin relasi sosial kemasyarakatan. Keberadaan kota dideterminasi oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Ketika manusia sudah memiliki kapasitas intelektual yang memadai, maka sebuah kota bisa didirikan. Kemampuan intelektual menentukan kualitas hidup masyarakat dari suatu zaman.

⁸ A. Sudiarja dan G. Budi Subanar (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 600.

Asosiasi hidup bersama yang dibangun oleh manusia tidak hanya berkisar seputar pendirian kota. Manusia akan memperlebar jangkauan relasi sosialnya pada lingkup yang lebih besar, yakni menyelenggarakan kehidupan dalam sebuah negara. Menurut Nikolas Driyarkara, negara adalah kehidupan, jadi saksi, gerak.⁹ Negara tidak boleh dipandang secara statis. Hal ini berarti bahwa negara tidak boleh dilihat sebagai batu yang tetap dan tidak berubah. Pandangan kita tentang negara harus bersifat dinamis. Negara dikatakan dinamis karena ada aksi bersama yang dilakukan oleh manusia. Manusia merupakan makhluk yang dinamis. Kompleksitas diri manusia tampak dalam diversitas unsur fisik dan psikis yang dimilikinya. Meskipun demikian, keragaman itu tetap mengarahkan diri kepada unitas, yakni pribadi manusia yang utuh.

Negara terbentuk atas aksi bersama yang dilakukan oleh individu-individu. Manusia membentuk koloni hidup bersama dan menciptakan suatu sistem pemerintahan. Di dalam negara, manusia mengintegrasikan dirinya dengan sesama yang lain. Dengan kata lain, manusia tidak hanya mengakui diri sendiri tetapi selalu membangun kesatuan dengan sesamanya.

Sekarang tidak banyak keberatan yang kita jumpai jika kita menyatakan bahwa manusia tidak dapat dimengerti bila tidak dipandang dengan dan dalam kesatuannya dengan sesama manusia. Manusia bukan hanya mengakui diri sendiri, melainkan juga mengakui diri sendiri sebagai bersatu dengan sesama manusia. Manusia bukan hanya “meng-aku”, melainkan “meng-kita”.¹⁰

Dalam negara, individu-individu membangun relasi satu sama lain demi mewujudkan kehidupan yang baik. Tentu ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kompleksitas kebutuhan inilah yang mendorong manusia menjalin hubungan dengan sesamanya. Adagium manusia bukan “meng-aku” melainkan “meng-kita” sesungguhnya merujuk pada aksi bersama yang harus digalangkan oleh masyarakat dalam lingkungan hidupnya. Negara sebagai sebuah lembaga sosial sangat membutuhkan aksi bersama dari warganya. Pandangan Nikolas Driyarkara mengenai negara sebagai suatu kehidupan, jadi saksi,

⁹ *Ibid.*, hal. 606.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 601.

gerak, sangat diperlukan dalam tata kelola negara. Alasan adanya negara ialah kehidupan manusia itu sendiri. Manusia ingin mempertahankan eksistensinya, maka ia mendirikan negara.

4.2.2 Negara Sebagai Bentuk Perwujudan Nilai

Negara sebagai suatu organisasi sosial menjadi wadah untuk menjelmakan nilai. Nilai dipahami sebagai sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan esensinya. Ada berbagai macam nilai yang dimiliki manusia. Semua nilai terpatri dalam diri individu-individu. Nilai-nilai tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Agar manusia dapat merealisasikan nilai-nilai dalam dirinya, diperlukan wahana yang tepat. Maka dari itu, beragam modus ditempuh manusia demi memmanifestasikan nilai-nilai yang ada padanya. Hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mengeksplorasi hakikatnya sebagai makhluk sosial.

Negara melibatkan individu-individu dalam mewujudkan nilai. Sebab, eksistensi negara dideterminasi oleh keberadaan manusia. Dalam kehidupan negara, martabat manusia atau individu harus diakui dan dihargai. Hal yang paling penting untuk diperhatikan ialah kesadaran dari setiap individu atas kesamaan harkat dan martabat.

Nilai-nilai individualis yang penting adalah ekualitas. Tanpa suatu persamaan fundamental akan status, maka peranan sosial dari individu-yakni suatu bentuk peranan sosial-tidak mempunyai dasar. Hanyalah dengan persamaan status yang demikian dan atribut bersama yang menandai identitas, maka seseorang dapat melihat dirinya sendiri sebagai seorang di antara *lainnya*. Negara diikat kepada nilai ekualitas paling tidak dalam pengertian ini: ia bermuara pada ketundukan yang sama kepada kewenangan atau kekuasaan tertinggi pemegang kedaulatan.¹¹

Ekuualitas mesti mendapat penekanan utama dalam kehidupan negara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa, negara itu tidak boleh dimaknai sebagai suatu institusi yang mati. Negara harus dilihat sebagai organisasi yang hidup; di mana manusia menjadi pelopor

¹¹ Nazaruddin Sjamsuddin dan Fakhruddin R. Lubis (Penerj.), *Politik Dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat Dan Teori*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal. 95.

utama dalam menyelenggarakan dan mendirikan negara. Maka dari itu, individu-individu harus menjalin kerja sama satu sama lain, sehingga terciptalah *bonum commune*. Kerja sama dapat berjalan dengan baik apabila ada pengakuan kesamaan hak di antara individu.

Bonum commune menjadi alasan fundamental pembentukan negara. Dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan negara. Nikolas Driyarkara sangat mengglorifikasi aksi bersama dari masyarakat. Menurut dia, beraksi atau berbuat bersama bagi manusia bertujuan untuk menjelmakan nilai.¹² Misalnya, untuk menjelmakan nilai ekonomi dan politik, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mengerahkan seluruh daya upaya dan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Negara adalah kesatuan (organisasi) kerja sama untuk melaksanakan semua nilai-nilai manusia, tetapi dengan catatan bahwa nilai-nilai itu juga tidak sama sekali tergantung pada kesatuan itu. Tergantung atau kurang tergantung atau tidak tergantungnya nilai-nilai itu tergantung dari sifatnya. Nilai-nilai ekonomi, misalnya, itu lebih tergantung pada penegaraan; oleh sebab itu, juga harus lebih dinegarakan! Dengan kata lain, di sini dan pada umumnya dalam lapangan jasmani, kekuasaan negara adalah lebih mendalam. Akan tetapi, misalnya dalam lapangan ilmu, kekuasaan negara adalah kurang. Ilmu tidak dapat didikte oleh negara!¹³

Negara sebagai lembaga perwujudan nilai memiliki batasan kewenangan. Negara tidak boleh bertindak otoriter, karena hanya nilai tertentu yang berada di bawah kekuasaan negara. Dalam pernyataan di atas digambarkan secara gamblang bahwa, peranan negara sebagai institusi perwujudan nilai hanya berkuat seputar nilai ekonomi dan nilai lain yang bersifat politis. Sedangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengembangan intelektual dan keindahan bisa ditangani oleh individu. Negara hanya mendukung dan memberikan syarat-syarat supaya ilmu bisa berkembang. Akan tetapi, negara tidak diberi wewenang untuk mengatur ritme ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki otonominya sendiri. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat obyektif dan tidak dapat dikontaminasi dengan ideologi negara. Walaupun demikian,

¹² Cf. A. Sudiarja dan G. Budi Subanar (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 608.

¹³ *Ibid.*

negara sangat memerlukan ilmu pengetahuan. Dalam dan melalui ilmu pengetahuan, negara bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

4.2.3 Negara Sebagai Bentuk Percakapan Antar Individu

Percakapan memainkan peranan yang penting dalam relasi antarindividu. Di dalam percakapan, individu-individu membangun dialog dan saling bertukar pikiran. Dialog membutuhkan medium sebagai sarana pengungkapan maksud. Pada titik ini, bahasa merupakan instrumen yang paling efektif untuk sebuah percakapan. “Bahasa adalah sebuah sistem simbol, tanda yang menunjuk pada makna untuk dapat dipahami”.¹⁴ Sebagai sebuah sistem simbol, bahasa menerjemahkan inti terdalam atau esensi yang tersirat pada suatu hal. Dengan demikian, horizon pemahaman manusia yang tersembunyi dapat diungkapkan.

Keterlibatan individu-individu sangat dibutuhkan dalam sebuah percakapan. Dalam kegiatan ini, setiap individu menempatkan diri sebagai pembicara dan pendengar. Ada hubungan timbal balik antara pembicara dan pendengar. Pembicara mengutarakan maksud, pendengar menyimak dan menerapkannya. Pembicara mengeksplorasi idenya dalam bentuk kata-kata, pendengar menanggapi dengan menyimak. Ide sang pembicara dapat berguna apabila disimak dan dilaksanakan oleh pendengar. Sebaliknya, pendengar akan diakui keberadaannya, jikalau ada komunikasi antara keduanya.

Komunikasi menjadi kata kunci dalam relasi antarmanusia. Dengan komunikasi, individu-individu dapat menggalang kerja sama demi terciptanya kesejahteraan bersama. Dialog memungkinkan manusia untuk menjalin kerja sama yang baik dengan partnernya. Dialog bisa berjalan kalau ada hal yang dibicarakan. Melalui berbicara, manusia saling bertukar pendapat dan memberikan pemahaman satu sama lain.

¹⁴ Paulus Budi Kleden, *Dialog Antaragama Dalam Terang Filsafat Proses Alfred North Whitehead*, (Maumere: Ledalero, 2002), hal. 88.

Dengan berbicara pembicara mengungkapkan kebutuhannya untuk dapat dimengerti oleh pendengar, untuk mendengar suaranya dengan telinga pendengar, dan melihat dirinya dengan mata orang lain. Kata-kata yang diungkapkan pembicara akan membangkitkan sejumlah kenangan masa lalu dari hidup pendengar, membuka matanya untuk mengenal situasi aktualnya dan menimbulkan harapannya akan masa mendatang.¹⁵

Kebutuhan untuk dapat dipahami oleh orang lain merupakan hal esensial dari kodrat manusia. Situasi seperti ini mendorong manusia membangun relasi sosial dengan sesamanya. Tujuan individu menjalin komunikasi ialah untuk mengenal dirinya dan situasi aktual yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, harapan akan masa depan dapat diprediksi dan diperjuangkan.

Kehidupan negara dianalogikan dengan percakapan. Jika di dalam percakapan terjadi interaksi antara pembicara dan pendengar, maka hal yang sama juga berlaku bagi kehidupan negara. Alasan adanya negara adalah demi terwujudnya *bonum commune*. Maka dari itu, masyarakat yang mendiami suatu negara harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan negara. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui dialog karya dan dialog verbal. Dialog karya berkaitan dengan kerja sama yang dibangun oleh individu untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti: pertanian, peternakan, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Sedangkan dialog verbal berhubungan dengan partisipasi warga dalam bidang politik (dengan menjadi anggota parlemen), hukum (menjadi hakim dan sejenisnya) dan juga dalam bidang pendidikan (menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah maupun pendidikan non formal).

Nikolas Driyarkara menggambarkan negara sebagai suatu bentuk percakapan yang terjadi antarindividu. Percakapan tidak hanya sebatas komunikasi verbal atau dialog yang terjadi antara satu individu dengan individu lain. Percakapan yang dimaksudkan di sini adalah kerja sama yang dibangun oleh setiap warga negara untuk menunjang kesejahteraan umum.

Dalam paparan ini sudah beberapa kali kita singgung bahwa negara (lebih tepat: *menegara*) sebagai kehidupan manusia adalah realisasi yang mengandung (unsur)

¹⁵ *Ibid.*, hal. 89-90.

kegagalan. Supaya hal ini menjadi jelas, kita kembali sebentar ke percakapan. Penegaraan adalah percakapan *antarmanusia*. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa setiap warga negara bercakap-cakap dengan setiap warga negara! Namun, dengan kesanggupannya bersama untuk hidup bersama, untuk memikul beban bersama, untuk melakukan wajib bersama, untuk bersama memperjuangkan hidup dan nasibnya, dengan kesemuanya ini kita bercakap-cakap bersama dan percakapan itu masih juga dilangsungkan dalam badan-badan perwakilan yang terus harus ada sebab percakapan tidak akan habis.¹⁶

Percakapan berarti kemampuan warga negara untuk hidup bersama, terlibat aktif dalam memperjuangkan hidup dan nasib bersama, dan kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Percakapan itu terejawantah dalam badan-badan perwakilan. Semuanya ini menjadi hal fundamental dalam menjalankan hidup di sebuah negara. Mengingat manusia terus berkembang, maka percakapan tidak akan mencapai garis finis. Jika manusia bertambah, maka kebutuhan akan meningkat pula. Hal ini berdampak pada pencapaian *bonum commune*. Dari sebab itu, percakapan tidak akan mencapai garis finis.

4.3 Hidup “Menegara” Menurut Nikolas Driyarkara

4.3.1 Makna Istilah “Menegara”

Basis pendirian suatu negara ialah sosialitas manusia. Dimensi sosial yang melekat dalam diri manusia mengarahkan dia untuk membangun hidup bersama. Negara termasuk salah satu organisasi sosial, di mana manusia merealisasikan potensinya sebagai *homo socius*. Hidup bersama dalam sebuah negara mengandung perbuatan dan nilai. Hal ini berarti bahwa individu-individu yang ada di dalamnya harus melakukan sesuatu yang berfaedah bagi kepentingan umum. Dengan kata lain, manusia tidak hanya *bernegara* (berada dalam negara) tetapi juga *menegara*. Selanjutnya akan dijelaskan makna istilah *menegara*.

Menegara lebih mengarah kepada suatu perbuatan atau aksi. Di dalam perbuatan atau aksi tersebut, masyarakat mengerahkan seluruh kapasitas dirinya untuk menghasilkan sesuatu.

¹⁶ A. Sudiarja dan G. Budi Subanar (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 609.

Hal-hal yang dihasilkan dalam aksi tersebut harus tertuju kepada kepentingan bersama. Aksi bersama juga turut menentukan eksistensi negara. Negara itu ada karena manusia *menegara*.

Adanya negara ialah karena dan selama manusia *menegara*. Andaikata itu berhenti, maka lenyap juga negara. Karena *menegara* itu aksi atau perbuatan manusia, jadi sebagai realisasi juga mengandung unsur kegagalan.¹⁷

Oleh karena *menegara* itu perbuatan manusia, maka kegagalan tidak dapat dihindari. *Menegara* menuntut aksi manusia atau warga negara. *Menegara* mewujudkan idealisme kehidupan yang baik. Akan tetapi, kehidupan yang ideal tidak sepenuhnya terealisasi, namun hidup *menegara* tetap diselenggarakan. Di bawah ini akan dicantumkan makna istilah *menegara*.

Menegara berarti menciptakan “kesatuan”. Dalam hidup *menegara*, individu-individu menjalin relasi satu sama lain. Relasi ini mengantar mereka pada kesatuan. Kesatuan dapat tercipta jika masyarakat menerima perbedaan. Perbedaan bisa disatukan dengan misi yang sama, yakni memperjuangkan *bonum commune*.

Demikian juga dengan *menegara* kita menjadi kesatuan, kita: *menjadi kita*. Akan tetapi, dengan perbuatan yang sedikit setiap warga negara dari setiap negara dapat berkata: *kita adalah negara itu! Kita, yang menegara dan penegaraan kita, itulah negara.*¹⁸

Menegara mengandung pengertian “bercakap-cakap”. Manusia tidak hanya bercakap-cakap dengan sesamanya, tetapi juga bercakap-cakap dengan alam. Dalam percakapan, manusia bergulat dengan alam. Pergulatan dengan alam bertujuan untuk menaklukkan alam, supaya alam bisa dimanfaatkan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil-hasil alam diolah oleh manusia. Inilah yang dinamakan dengan produksi. Teknologi-teknologi produksi merupakan hasil pengolahan budi manusia.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 607.

¹⁸ *Ibid.*

4.3.2 Makna Istilah “Menegarakan”

Masyarakat tidak sekedar *bernegara*, tetapi harus *menegara* dan *menegarakan* dirinya. Secara sederhana, pernyataan tersebut dapat dimengerti demikian: eksistensi manusia dalam suatu negara tidak sekedar “ada bersama tanpa berbuat apa-apa”. Sebaliknya, manusia yang menamakan dirinya warga negara mesti melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan negara. Maka dari itu, Nikolas Driyarkara menandakan bahwa masyarakat tidak hanya *bernegara*, melainkan *menegara* dan *menegarakan*. Pada bagian ini akan dideskripsikan makna istilah *menegarakan*.

Menegarakan dimaknai sebagai “pengintegrasian diri manusia”. Manusia *menegarakan* diri sendiri, sesama manusia dan tanahnya dengan seluruh keadaannya.¹⁹ Manusia yang ‘mengintegrasikan’ atau *menegarakan* diri sendiri dimengerti dalam konteks pendayagunaan unsur-unsur pribadi demi kepentingan bersama. Bahwasanya, manusia merupakan makhluk hidup yang terkomposisi atas tubuh dan jiwa. Unsur-unsur fisik biasanya dapat dilihat. Sedangkan unsur-unsur kejiwaan tidak dapat dipantau secara kasat mata. Intelek, perasaan dan kehendak termasuk dalam komponen jiwa. Manusia mengerahkan seluruh kemampuan fisik dan psikisnya untuk menjalankan peranannya dalam negara.

Masyarakat juga mengintegrasikan atau *menegarakan* dirinya dengan sesama dan tanah. Hal ini menunjukkan dimensi sosial dari manusia. Dalam sebuah negara, manusia tidak berada sendirian, tetapi dia memiliki ikatan relasional dengan sesama dan alam. “Situasi manusia yang paling dasar ialah tinggalnya dalam dunia sebagai ruang”.²⁰ Alam menyediakan berbagai kekayaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia juga harus memperlakukan sesamanya sebagai kolega atau partner dalam kehidupan negara. Sesama bisa dijadikan sarana pertukaran pikiran. Kehidupan negara dapat berjalan dengan baik

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Theo Huijbers, *Manusia Merenungkan Dirinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 148.

kalau relasi antarwarga berlangsung efektif. Dengan bertukar pikiran, individu menyatukan pikiran dan kehendaknya dengan orang lain. Inilah aspek *menegarakan* yang harus dihidupi warga negara.

4.3.3 Hubungan Antara Hidup “Menegara” Dan “Menegarakan”

Negara akan tetap eksis jika penduduknya *menegara* dan *menegarakan* diri sendiri, sesama dan tanah atau lingkungan alam. *Menegara* dan *menegarakan* sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan negara. Masyarakat bisa mewujudkan cita-cita bersama apabila mereka *menegara* dan *menegarakan* diri dengan sesama dan alam. *Raison d’etre* negara ialah kesosialan kita. Negara terbentuk karena kodrat manusia selaku *homo socius*. Sebagai *homo socius*, manusia berdialog dengan sesamanya.

Me-negara dan *me-negara-kan* adalah aksi bersama. Bandingkanlah dengan percakapan! Di situ aksi bersama mengadakan kesatuan. Demikianlah juga: *me-negara* dan *me-negara-kan*. Lihatlah orang-orang yang bersama-sama main tenis, bulu tangkis, sepak bola atau permainan apa saja! Nampaklah di situ bahwa aksi bersama itu mengadakan kesatuan. Dan kesatuan itu bukanlah kesatuan yang hanya duduk, tidak melakukan apa-apa! Kesatuan yang kita pandang itu tidak bisa dipisahkan dari keaksian: kesatuan itu adalah kesatuan *dalam dan karena berbuat!* Kesatuan yang berbuat tidak dan juga bukan dua barang, melainkan satu barang, ialah permainan yang sedang berjalan itu.²¹

Dialog merupakan unsur esensial dalam hidup *menegara* dan *menegarakan*. Dalam dan melalui dialog, manusia mewujudkan kesatuan. Manusia mewujudkan kesatuannya dengan sesama di dalam komunitas. Sebuah *societas* memiliki karakter “dialogal” karena manusia hidup bersama dengan sesamanya. Dialogalitas adalah hidup itu sendiri, hidup yang dimiliki manusia.²² Dialog dapat berjalan karena dimensi intelektual yang dimiliki manusia. Akal budi menjadi *differentia spesifica* antara manusia dan hewan. Oleh karena *ratio* yang dimilikinya, maka dia mampu berkomunikasi dengan sesamanya. Dialog menyatukan dua individu.

²¹ Nikolas Driyarkara, *Negara Dan Bangsa, Op. Cit.*, hal. 9-10.

²² E. Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hal. 187.

Demikian juga dalam hidup *menegara* dan *menegarakan*. Dengan *menegara* dan *menegarakan*, masyarakat membentuk kesatuan.

Hubungan antara *menegara* dan *menegarakan* terletak pada aksi atau perbuatan bersama. “*Menegara* dan *menegarakan* adalah aksi bersama”.²³ Aksi bersama mengantar manusia kepada kesatuan. Di dalam kesatuan, manusia melakukan tindakan bersama. Tindakan bersama tersebut bermuara pada tercapainya kesejahteraan umum. Jadi, kesatuan yang tercipta antarwarga negara tidak sekedar ada bersama tanpa melakukan apa-apa; melainkan kesatuan *dalam* dan *karena* berbuat.²⁴

4.3.4 Tujuan Hidup “*Menegara*” Dan “*Menegarakan*”

Menegara dan *menegarakan* merupakan dua hal yang saling berhubungan. *Menegara* mengacu pada ‘kehidupan’ dalam negara. Sementara itu, *menegarakan* merujuk pada ‘pengintegrasian’ diri manusia dengan diri sendiri, sesama dan tanah. Hal ini berdampak pada terciptanya kesatuan antara manusia dengan diri sendiri, sesama dan alam. Lantas, apa yang hendak dicapai dalam hidup *menegara* dan *menegarakan*? Sekurang-kurangnya ada dua hal pokok yang menjadi tujuan dari hidup *menegara* dan *menegarakan*.

Pertama, *menegara* dan *menegarakan* bertujuan untuk menjelmakan nilai. Nilai apa saja yang akan dijelmakan dalam hidup *menegara* dan *menegarakan*? Tentu semua nilai manusia. Nilai-nilai yang akan dijalankan dalam hidup *menegara* dan *menegarakan* ialah nilai-nilai yang melibatkan ‘kesatuan’ antarindividu.

Beraksi atau berbuat bagi manusia selamanya adalah untuk menjelmakan nilai. Di mana manusia beraksi bersama di situ ada kesatuan, dan kesatuan itu ialah untuk menjelmakan nilai. Manusia bisa beraksi bersama, misalnya untuk menjelmakan keindahan dengan seni tari dan gamelan. Manusia bisa mengadakan aksi bersama, misalnya, untuk menjelmakan nilai ekonomi.²⁵

²³ Nikolas Driyarkara, *Negara Dan Bangsa*, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 10.

²⁵ A. Sudiarja dan G. Budi Subanar (Eds.), *Loc. Cit.*

Kedua, menegara dan menegarakan bertujuan untuk menciptakan ‘kesatuan’. Kesatuan tidak hanya mencakup manusia. Kesatuan yang hendak dibangun di sini bersifat komprehensif. Manusia atau warga negara harus mengintegrasikan dirinya dengan alam jasmani. Kesatuan dapat tercapai jika ada percakapan. Oleh karena itu, Nikolas Driyarkara mengibaratkan ‘kesatuan’ manusia dan alam dengan percakapan.

Percakapan itu mempersatukan. Demikian juga percakapan kita dengan dunia jasmani. Dunia jasmani menjadi satu dengan kita dalam bentuk-bentuk rumah, pakaian, makanan, alat-alat teknik, alat-alat kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tidak mungkin logam terbang atau menjelajah samudera! Akan tetapi lihatlah kapal terbang, lihatlah perahu! Di situ besi dan barang jasmani lain dibangun oleh manusia dan bersatu dengan manusia! Lihatlah hasilnya! Lihatlah obat-obatan dan alat-alat kedokteran! Sungguh mengagumkan pikiran manusia yang sudah “masuk” ke dalam barang-barang itu sehingga dapat membawa kebahagiaan dan pembawa maut membawa hidup!²⁶

Kesejahteraan umum dapat tercapai jika masyarakat mengintegrasikan dirinya dengan sesama dan alam. Pengintegrasian diri manusia diejawantahkan dalam dialog dengan sesama. Pengintegrasian diri manusia dengan sesamanya terwujud melalui dialog. Dialog menjadi unsur pemersatu antarindividu. Dengan dialog, dua individu menjadi satu. Dalam dan melalui dialog, manusia memberikan diri lewat ide-ide yang disampaikannya. Selain itu, ‘penegaraan’ dimaknai sebagai pemberian diri masyarakat untuk kepentingan negara. Dalam situasi perang, masyarakat memberikan hidupnya.

Hidup *menegara* dan *menegarakan* mengungkapkan dimensi kesosialan manusia. Sosialitas manusia menjadi fundamen utama dalam membangun hidup bersama. Oleh karena manusia itu makhluk sosial, maka dia *menegara* dan *menegarakan* dirinya dengan sesama dan alam. Masyarakat harus menyadari bahwa dirinya merupakan tenunan dari orang lain, yaitu orangtuanya sendiri. Hal ini sudah membuktikan bahwa dia adalah makhluk sosial. Jika manusia itu makhluk sosial, maka dia harus mempersembahkan seluruh kemampuannya untuk

²⁶ *Ibid.*, hal. 609-610.

kebaikan bersama. *Bonum commune* menjadi agenda penting dari aktivitas manusia dalam hidup bersama. Dengan demikian, kapasitas manusia selaku makhluk sosial sungguh-sungguh diterapkan.

4.4 Korelasi Antara Kewarganegaraan Aristoteles Dan Hidup “Menegara” Menurut Nikolas Driyarkara

4.4.1 Masyarakat Sebagai Penggerak Utama (*Motor Primus*)

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan negara. Negara terbentuk karena sekelompok manusia menghendaknya. Manusia membentuk negara dengan tujuan untuk mengembangkan dimensi sosialitas yang ada dalam dirinya. Bahwasanya, manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial. Atas dasar inilah, manusia membentuk koloni hidup bersama. Koloni hidup bersama dapat dijumpai dalam tingkat yang paling sederhana, seperti rumah tangga hingga lingkup yang lebih besar, yaitu negara.

Aristoteles memulai karya politiknya dengan mengulas kehidupan rumah tangga. Rumah tangga dan kota (*polis*) memiliki hubungan timbal balik. Rumah tangga memproduksi warga negara, di mana individu-individu yang dihasilkan oleh keluarga kelak akan menjadi warga *polis*. Sebaliknya, *polis* harus menjamin keberadaan keluarga-keluarga. Sebab sebuah *polis* terkomposisi atas rumah tangga-rumah tangga. Aristoteles mengatakan demikian.

Setelah diketahui dari analisis sebelumnya, apa unsur-unsur yang membentuk kota, pertama-tama kita harus mempertimbangkan pengelolaan rumah tangga; karena setiap kota terdiri dari rumah tangga-rumah tangga. Bagian dari pengelolaan rumah tangga akan berhubungan dengan bagian yang membentuk rumah tangga itu sendiri.²⁷

Masyarakat dilihat sebagai penggerak utama (*motor primus*) dari kehidupan negara. Aristoteles dan Nikolas Driyarkara sama-sama menekankan pentingnya peranan manusia dalam kehidupan negara. Negara akan tetap eksis jika ada warga negara. Rakyat menjadi

²⁷ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 8.

pemeran utama dalam menjalankan atmosfer kehidupan negara. Hakekat negara terletak pada manusia yang mendiaminya. Negara tidak boleh dipahami sebagai sebuah institusi yang mati. Sebaliknya, negara menjalankan sistem kehidupan itu sendiri. Lantas, negara menjadi wadah perhimpunan orang-orang yang hidup. Bahkan, negara hanya terwujud dalam diri makhluk rasional (*ens rationale*). Hal ini yang membedakannya dengan makhluk infrahuman.

Manusia memiliki dua fakultas utama, yakni akal budi (intelekt) dan kehendak. Dengan kedua kemampuan ini, manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa jika dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Intelekt dan kehendak memobilisasi manusia untuk berbuat sesuatu, termasuk kehendak untuk membangun hidup bersama. Dalam membangun kerja sama, manusia menggunakan kemampuan intelekt dan kehendaknya demi mencapai *bonum commune*. Intelekt membantu manusia dalam merencanakan sesuatu. Oleh karena negara ditinjau sebagai organisasi kehidupan, maka dia harus digerakkan oleh orang yang hidup pula, yakni manusia. Selain itu, kehendak juga memainkan fungsinya yang penting dalam kehidupan negara. Kehendak manusia untuk ada bersama orang lain menjadi kunci keberhasilan relasi sosial antarwarga negara. Dengan ini jelas bahwa, masyarakat bertindak sebagai penggerak utama (*motor primus*) dari kehidupan negara.

4.4.2 *Bonum Commune* Sebagai Tujuan Akhir

Sosialitas manusia mendapat realisasinya dalam hidup bersama. Manusia membentuk koloni hidup untuk mewujudkan hakekatnya sebagai makhluk sosial. Dalam kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia membangun relasi dengan sesamanya. Relasi yang dijalin antarindividu sebenarnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni tercapainya *bonum commune*. Oleh karena itu, manusia mengupayakan berbagai cara untuk mengaktualisasikan tujuannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah mendirikan negara. Negara menjadi wadah bagi manusia dalam merealisasikan kodrat kesosialannya.

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendirian *polis* adalah untuk menciptakan *bonum commune*. “Bagi Aristoteles, ukuran sebuah negara yang baik terletak pada sejauh mana negara melayani kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan”²⁸ Menurut dia, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini disebabkan oleh kondisi diri manusia yang ruwet. Secara kodrati, manusia itu terkomposisi atas tubuh dan jiwa. Keduanya dilihat sebagai substansi yang otonom. Masing-masing substansi memiliki bagian yang sangat kompleks. Setiap bagian harus dipenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan pandangan Aristoteles, kebaikan bersama tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek dari *bonum commune*. Ada hal lain yang perlu diperhatikan, misalnya: kebutuhan di bidang hukum, politik, religi, sosial dan keamanan atau pertahanan. Semua unsur tersebut tidak dapat dipenuhi oleh satu orang saja. Perlu digalangkan kerja sama antarindividu. Maka dari itu, manusia membentuk koloni hidup bersama dan menjalin relasi dengan sesama dan alam lingkungan.

Hal yang sama juga ditandakan oleh Nikolas Driyarkara. Nikolas Driyarkara memberi penekanan pada aspek sosialitas manusia. Dimensi hidup bersama tercipta karena kesosialan manusia. Manusia membentuk koloni hidup bersama guna menjelmakan ‘nilai’. Istilah teknis yang digunakan oleh Nikolas Driyarkara ialah *menegara* dan *menegarakan*. Manusia *menegara* dan *menegarakan* dirinya dengan sesama dan alam untuk mencapai kesejahteraan umum. Ada beragam nilai yang hendak dijelmakan dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai itu seperti: nilai ekonomi, nilai sosial, nilai keindahan, nilai religi, dan masih banyak nilai lainnya. Singkatnya, nilai-nilai kehidupan manusia yang akan diwujudkan dalam hidup bersama sesungguhnya berorientasi pada pencapaian *bonum commune*.

²⁸ James K. Feibleman, *Understanding Philosophy*, (Mumbai: Jaico Publishing House, 1996), hal. 63. “The test of a good state for Aristotle was whether it served the common interest in accordance with strict principles of justice”.

4.4.3 Berpatokan Pada Partisipasi Warga

Bonum commune dapat tercapai kalau masyarakat terlibat aktif dalam kehidupan negara. Kesejahteraan bersama berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bergulat seputar pengadaan sarana dan prasarana. Pembangunan mencakup pula pembentukan karakter manusia. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengembangkan semangat kerja sama. Dalam pandangan masyarakat umum, partisipasi dimengerti sebagai kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.²⁹ Selanjutnya akan dijelaskan pandangan Aristoteles dan Nikolas Driyarkara tentang partisipasi warga dalam negara.

Aristoteles menegaskan bahwa partisipasi warga dalam *polis* sangat penting. *Polis* merupakan aktualisasi dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam *polis*, masyarakat mewujudkan dimensi kesosialannya. Alasan adanya *polis* ialah demi terciptanya *bonum commune*. “Aristoteles mengadvokasi cara hidup partisipatif, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan diperintah”.³⁰ Atas dasar inilah, manusia membangun sebuah *polis*.

Polis merupakan aktivitas kehidupan yang dilakoni oleh masyarakatnya. Dengan kata lain, *polis* diidentikkan dengan kehidupan para warganya. Selama manusia masih menjalankan aksi bersama di dalam *polis*, maka eksistensi *polis* tetap tampak. Partisipasi warga dalam *polis* ditunjukkan melalui keterlibatan mereka dalam bidang deliberatif dan yudisial. Aksi bersama yang dijalankan oleh masyarakat mengarah kepada kesejahteraan umum.

²⁹ Cf. Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 222.

³⁰ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, (Mauwera: Ledalero, 2010), hal. 135.

Nikolas Driyarkara juga menguraikan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa adanya negara ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Negara itu ada karena dan selama masyarakat *menegara*.³¹ Jika manusia tidak *menegara* maka lenyaplah negara. *Menegara* berarti melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, *menegara* berarti melakukan aksi atau perbuatan bersama. Aksi bersama ditunjukkan lewat partisipasi masyarakat dalam negara. Partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan, serta aspek kehidupan lainnya. Semuanya itu menjurus kepada tujuan yang hendak dicapai bersama, yakni terwujudnya *bonum commune*.

Aristoteles dan Nikolas Driyarkara memiliki kesamaan dalam pemikiran. Kemiripan itu tampak dalam pandangan mereka tentang *polis* dan negara. Keduanya menekankan manusia sebagai tokoh sentral dalam memobilisasi atmosfer kehidupan politik. Kehidupan politik mendapat realisasinya dalam negara atau *polis*. *Polis* dan negara merupakan ekspresi riil dari sosialitas manusia. Bahkan keduanya sama-sama menekankan aspek sosialitas manusia. Bahwasanya, dasar atau fundamen utama dari *polis* maupun negara adalah sosialitas manusia. Sosialitas inilah yang mendorong manusia untuk membangun hidup bersama.

4.5 Warga Negara Sebagai Pribadi Nasional

4.5.1 Pribadi Yang “Memprabadikan” Diri

Manusia merupakan makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, dia menentukan dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan hidup, manusia tetap menerapkan kebebasannya. Kehendak bebas merupakan unsur dasariah dari hakekat manusia sebagai makhluk yang otonom. Manusia memang diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu. Akan tetapi, kebebasan dalam bertindak harus dilandasi oleh sikap tanggung jawab. Sikap

³¹ Cf. A. Sudiarja dan G. Budi Subanar (Eds.), *Loc. Cit.*

tanggung jawab mesti dipupuk dalam diri setiap orang. Sehingga kebebasan yang dimiliki oleh manusia ialah kebebasan yang bertanggung jawab.

Manusia juga termasuk makhluk yang ber-*persona*. *Persona* manusia terletak dalam kerohaniannya. Oleh karena sisi kerohaniannya inilah, manusia memperlakukan sesamanya sebagai subyek dan bukan obyek. Dasar dari semuanya itu adalah cinta. Kemampuan untuk mencintai lahir dari kerohanian manusia.

Sebagai *persona* manusia terdorong oleh kodratnya dan kerohaniannya untuk mencintai orang-orang lain, maka dengan demikian ia menjadi semakin sempurna sebagai *persona*. Dan sebaliknya, bila unsur-unsur jasmani menjadi makin kuat, bila ia mendekati orang lain untuk memperalatnya, ia merosot sebagai *persona*. Kepribadiannya turun.³²

Kapasitas manusia sebagai pribadi tidak terlepas dari komposisi jasmani dan rohani. Kedua hal tersebut menjelunut dalam diri manusia. Aspek jasmani dan rohani bisa memengaruhi kepribadian manusia. Ketika dimensi kerohanian lebih menonjol, maka dia semakin sempurna sebagai 'persona'. Jika sisi jasmaniah mendominasi dirinya, maka dia gagal sebagai *persona*.

Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, jika relasi para warga berlangsung harmonis. Keharmonisan itu dapat dicapai ketika manusia mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain. Hal itu ditunjukkan melalui cara memperlakukan sesamanya. Sesama tidak lagi dianggap sebagai obyek, tetapi sebagai subyek; atau dalam rumusan filosofisnya adalah relasi Aku-Engkau. Pada tataran ini, manusia mengakui keberadaan orang sebagai yang setara dengannya. Meskipun demikian, manusia tetap *mempribadikan* dirinya secara kontinyu. Sebab aspek kejasmaniannya masih termaktub dalam dirinya.

Manusia itulah berdiri sendiri, secara berdaulat, swadiri, merupakan pribadi atau *persona*. Akan tetapi, ia masih harus *mempribadikan* diri. Berkat kerohaniannya manusia sejak adanya sudah merupakan pribadi. Akan tetapi, karena kejasmaniannya

³² Nikolas Driyarkara, *Pertjikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, 1963), hal. 97.

manusia itu bersifat *evolitif*. Artinya, kedewasaan sebagai pribadi harus dicapai taraf demi taraf, masih harus diisi.³³

4.5.2 Pribadi Yang Membentuk Kebangsaan

Kesatuan antarpribadi dalam suatu koloni hidup bersama mengejawantahkan dimensi kesosialan manusia. Bahwasanya, keberadaan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah. Kata bangsa itu sendiri diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal atau keturunan. Hal ini sesuai dengan makna asli kata bangsa.³⁴ Akan tetapi, keberadaan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kesatuan darah atau keturunan. Eksistensi bangsa didasarkan pula pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Sebagai ‘persona’, manusia memang memiliki otonomi diri; di mana dia mampu menjalankan hidupnya secara mandiri. “Sosialitas sebagai bagian dimensi manusia merupakan fakta. Dimensi ini termasuk dalam kenyataan yang dijalani oleh manusia setiap hari”.³⁵ Kenyataan ini tidak dapat dielakkan oleh manusia. Setiap individu menjalin relasi sosial dengan sesamanya. Hal ini bisa terlaksana jika manusia memiliki keterbukaan hati dalam berelasi.

Pandangan Nikolas Driyarkara tentang “pribadi yang membentuk kebangsaan” lebih dititikberatkan pada dimensi kesatuan manusia. Identitas manusia mendapatkan penegasannya ketika “ada bersama orang lain”. Kesatuan dirinya dengan orang lain (relasi Aku-Engkau) menjadi fundamen utama pendirian sebuah bangsa.

Cara kita berada harus kita sebut berada-bersama. Karena berada-bersama itu struktur kita, maka pekerjaan kita juga harus berupa kerja sama. Kesatuan berada menjelma menjadi kesatuan bekerja terutama usaha mempribadikan diri harus dijalankan

³³ A. Sudiarja dan G. Budi Subanar, *Op. Cit.*, hal. 615.

³⁴ Kata ‘bangsa’ dalam bahasa Inggris disebut ‘*nation*’. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin, *natus* yang berarti lahir/kelahiran. Jadi, secara harafiah kata ‘bangsa’ didefinisikan sebagai kesatuan individu berdasarkan asal-usul kelahiran atau berdasarkan garis keturunan.

³⁵ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 105.

bersama-sama dengan sesama manusia. Dalam mempribadikan bersama itu manusia membangun kesatuan yang disebut kebangsaan.³⁶

Suatu bangsa dapat dibentuk ketika manusia *berada-bersama* orang lain. Dengan demikian, pemahaman kita tentang ‘kebangsaan’ tidak hanya didasarkan pada aspek keturunan atau kelahiran. Ketika manusia menciptakan kesatuan hidup bersama melalui relasi sosial, di situlah sebuah bangsa terbentuk. Ketunggalan darah dan kesatuan wilayah geografis bukan menjadi satu-satunya faktor yang membentuk kebangsaan. Sebuah bangsa akan eksis ketika ada aktivitas manusia yang membangun.

4.5.3 Pribadi Yang Menghasilkan Kebudayaan

Kebudayaan ditentukan dan diciptakan oleh manusia. Manusia menjadi pelaku utama dari kebudayaan itu sendiri. Berkat kemampuan akal budinya, manusia dapat membentuk kebudayaan. Ada begitu banyak kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia. Kebudayaan menentukan identitas manusia. Di dalam kebudayaan, manusia mengintegrasikan dirinya dengan alam, adat-istiadat, bahasa, sistem kekerabatan, organisasi sosial, dan berbagai unsur lainnya. Semua unsur tersebut dijalankan dan dilakoni oleh manusia dalam relasi dengan dirinya, sesama dan alam semesta. Ketiga hal ini membentuk satu-kesatuan dan mengkrystal dalam situasi riil masyarakat, yang disebut kebudayaan.

Kesadaran mendapat penekanan utama dalam pembentukan kebudayaan. Manusia merupakan makhluk yang berkesadaran. Oleh karena kesadaran yang dimilikinya, maka dia mampu menciptakan dan membentuk kebudayaan.

Dipacu oleh perkembangan kesadaran manusia dalam masa pencerahan; subyektivitas manusia sebagai pelaku kebudayaan ditegaskan dalam ‘*homosignificans*’: manusia dilihat sebagai subyek yang menamai sejarahnya.³⁷

³⁶ A. Sudiarja dan G. Budi Subanar, *Op. Cit.*, hal. 616.

³⁷ Mudji Sutrisno, *Ranah-Ranah Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 157.

Kebudayaan hanya dimiliki oleh makhluk yang berkesadaran. Dengan kesadaran, manusia mampu mengukir sejarah atau kenyataan historis. Manusia dapat mengukir sejarah, karena dia menjalankan hidup dengan kesadaran. Melalui kesadaran, manusia mengalami dan memaknai hidup secara unik. Keunikan manusia terletak pada dimensi rasionalitas, subyektivitas dan libertas. Kekhasan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kebudayaan.

Manusia mencapai taraf kebudayaan ketika dia mampu mengadakan sesuatu. Manusia mengintegrasikan diri dengan alam jasmani dan berada dalam satu struktur. Akan tetapi, manusia tetap melampaui alam. Hal ini diakibatkan oleh dimensi kerohanian yang dimiliki oleh manusia. Dengan kerohaniannya, manusia mentransendensikan dirinya. Dia mengatasi alam jasmani dan mengerti hukum-hukumnya. Kemampuan mentransendensi diri membuat manusia tidak hanyut dalam alam jasmani.

Dimensi kebudayaan manusia ditentukan pula oleh kemampuannya untuk mengolah alam. Manusia mengadakan sesuatu yang belum diadakan oleh alam jasmani. Oleh karena itu, manusia dikenal pula sebagai makhluk yang membudaya.

Manusia itu membudaya. Dan dengan mem-budaya dia mem-budaya-kan diri sendiri dan alam jasmani. Dengan demikian alam jasmani diangkat ke dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka kayu, besi, tanah, dan lain-lain material menjadi rumah; hutan rimba menjadi sawah dan ladang, kapas menjadi pakaian, bahkan pembawa maut seperti 'bisa', dijadikan obat, sehingga menjauhkan maut dan mempertahankan hidup.³⁸

Segala hal yang diadakan oleh manusia merujuk pada penciptaan *bonum commune*. Manusia memanfaatkan dan mengolah hasil alam demi kesejahteraan bersama. Dia tidak menerima begitu saja apa yang disediakan oleh alam. Sebaliknya, dia membudidayakan kekayaan alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya setiap hari. Dengan demikian, alam

³⁸ Nikolas Driyarkara, *Negara Dan Bangsa, Op. Cit.*, hal. 19.

jasmani tidak diperlakukan sebagai alam *an sich*, melainkan diangkat ke dalam alam manusiawi.³⁹

4.6 Metode Fenomenologi Eksistensial Dalam Filsafat Nikolas Driyarkara

4.6.1 Metode Fenomenologi

Fenomenologi termasuk salah satu aliran filsafat barat yang didirikan oleh Edmund Husserl. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir pada tahun 1859 di sebuah kota kecil yang bernama Prosznitz, daerah Moravia, dan sekarang masuk wilayah Ceko-Slovakia. Dia sudah menghasilkan berbagai macam tulisan, namun karyanya yang terpenting ialah *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie* (Gagasan-gagasan mengenai fenomenologi murni dan filsafat fenomenologis). Karya ini diterbitkan pada tahun 1913. Di bawah ini akan dijelaskan makna etimologis dari fenomenologi.

Secara etimologis, kata ‘fenomenologi’ berasal dari kata majemuk Yunani Kuno: *phainomenon* (cahaya, memendarkan diri dari dalam dirinya) dan *logos* (ilmu, berbicara tentang sesuatu dengan berlandaskan pada pertimbangan akal budi). Dalam pengertian umum, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomen-fenomen atau gejala-gejala tentang sesuatu yang tertentu di dalam pengalaman pra-sadar ataupun pengalaman sadar manusia.⁴⁰ Eksistensi sesuatu dikenal berdasarkan fenomen-fenomen yang ditampakkannya. Hal ini hendak mengafirmasi bahwa, eksklusivitas pengalaman manusia tidak berlaku lagi. Pengalaman pra-sadar maupun pengalaman sadar dari seorang individu bisa disingkap keberadaannya. Pengalaman-pengalaman tersebut mempresentasikan diri dalam bentuk fenomen-fenomen.

³⁹ *Ibid.*, hal. 20.

⁴⁰ F.X. Haryanto Cahyadi, “Dua Ratus Tahun Fenomenologi Roh Hegel, Tantangan Ilmu Pengetahuan Dalam Ranah Filsafat Dewasa Ini”, dalam *Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2006, (Abepura: Biro Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur), 3-28, hal. 9.

Edmund Husserl mencetuskan pemikirannya yang unik tentang fenomenologi. Menurut dia, tidak ada tirai atau selubung yang memisahkan kita dari realitas.⁴¹ Jika tidak ada hal yang memisahkan kita dari realitas, maka realitas itu sesungguhnya menampakkan dirinya di hadapan kita. Horizon pemikiran seperti ini tentu bertolak belakang dengan pandangan para filsuf sebelumnya. Misalnya, Imanuel Kant yang mengatakan bahwa manusia hanya mengenal “ketampakkan dari sesuatu” atau “fenomen-fenomen” saja (*Erscheinungen*) dan bukan *das Ding an sich*-nya.⁴² *Noumenon* tidak mungkin dikenal oleh manusia. Sebab, keberadaan *noumenon* tersembunyi di balik fenomena. Pemikiran Kant dipengaruhi oleh pandangan dari Descartes; yang mana Descartes menerapkan *cogito* tertutup. Husserl melakukan suatu revolusi dalam Filsafat Barat. Jika sejak zaman Descartes pemahaman tentang “kesadaran” bersifat tertutup, maka Husserl mengadakan perubahan yang radikal. Dia mengatakan bahwa “kesadaran” senantiasa merujuk pada realitas.

Metode filsafat yang diprakarsai oleh Husserl disebut metode fenomenologis. Metode ini bertujuan untuk menunjukkan cara berpikir tepat yang khusus. Dalam hal ini, Husserl menetapkan metode fenomenologis sebagai suatu metode ilmiah filosofis yang bebas dari pelbagai prasangka metafisis. Pernyataan ini hendak menegaskan bahwa realitas dijumpai dalam fenomen-fenomen yang tampak. Kalau sebelumnya para filsuf berpandangan bahwa kebenaran itu bersifat metafisis, maka tidak demikian dengan Edmund Husserl. Kebenaran justru dijumpai dalam realitas yang ada. Dengan lain perkataan, kebenaran mempresentasikan dirinya melalui fenomen-fenomen.

Istilah teknis yang digunakan dalam metode fenomenologi adalah reduksi atau *epokhe*.⁴³ Metode ‘reduksi’ atau *epokhe* bertujuan untuk melakukan sterilisasi terhadap hal-hal

⁴¹ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981), hal. 111.

⁴² *Ibid.*, hal. 110.

⁴³ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 110.

yang bersifat tambahan. Dengan demikian, otentisitas dari suatu obyek dapat ditemukan. Selain itu, Husserl juga menggunakan term *'einklammerung'* (ditempatkan di antara kurung). Dalam 'reduksi' terdapat tiga hal pokok, yakni reduksi fenomenologis, reduksi *eidetis* dan reduksi fenomenologis-transendental.

4.6.2 Metode Eksistensialisme

Tokoh-tokoh eksistensialisme seperti Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel dan juga Marleau Ponty mengembangkan pemikiran filsafat secara berbeda. Para eksistensialis sesungguhnya tidak menerima pandangan Edmund Husserl yang terlalu menekankan pengalaman atau sikap obyektif dan menyisihkan eksistensi. Menurut mereka, hal pertama yang perlu dianalisa adalah eksistensi manusia. "Eksistensialisme menghadapkan manusia pada dirinya sendiri, tanpa referensi, tanpa titik pijak".⁴⁴ Eksistensi manusia tidak ditentukan oleh hal lain yang berada di luar dirinya. Sebaliknya, keberadaan manusia ditetapkan oleh dirinya sendiri. Di sini unsur subyektivitas dari manusia memainkan peranannya secara dominan.

Di atas sudah dibicarakan secara garis besar beberapa filsuf eksistensialisme. Pada bagian ini akan diulas sifat-sifat eksistensi yang dicanangkan oleh para eksistensialis.⁴⁵ *Pertama*, subyektivitas individual yang unik, bukan obyek dan tidak umum. Eksistensialisme bertalian erat dengan subyek. Apa yang ditampakkan ke luar merupakan ciri khas atau keunikan dari seorang individu. Individu tidak diperlakukan sebagai obyek, tetapi subyek. *Kedua*, keterbukaan bagi manusia lain dan bagi dunia. Hal ini menyangkut perpaduan antara intensionalitas dan praktis, bukan teori saja. *Ketiga*, pengalaman afektif dalam hubungan dengan dunia, bukan observasi. *Keempat*, kesejarahan dan kebebasan, bukan suatu esensi yang

⁴⁴ A. Setyo Wibowo, "Eksistensi Kontingen: Satu Sudut Pandang Membaca Kisah Hidup Dan Pemikiran Jean Paul Sartre", dalam R. Sani Wibowo dan Benny Beatius Wetty (eds.), *Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 36.

⁴⁵ Anton Bakker, *Op. Cit.*, hal. 119.

tetap. *Kelima*, segi tragis dan kegagalan. Kelima unsur ini melekat dalam aliran eksistensialisme.

Metode eksistensialisme masih berhubungan dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi secara *de facto* bersifat otentik. Dalam analisa eksistensi, digunakan metode fenomenologi yang otentik dan melibatkan observasi serta analisa teliti.⁴⁶ Fenomenologi yang dicetuskan oleh Husserl tidak diabaikan. Pada umumnya, para filsuf eksistensialisme tetap menggunakan fenomen-fenomen sebagai titik tolak. Akan tetapi, orientasi utama penyelidikan mereka ialah dimensi intensional. Fenomen ditelaah sejauh disadari secara langsung dan spontan, sebagai ‘yang lain’ dari kesadaran.⁴⁷

4.6.3 Metode Fenomenologi Eksistensialis

Nikolas Driyarkara mengatakan bahwa manusia itu bukan serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*), sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Hobbes. Sebaliknya manusia adalah teman bagi sesamanya (*homo homini socius*). Pandangan Nikolas Driyarkara tentang *homo homini socius* sesungguhnya menjurus kepada pemikiran eksistensial mengenai manusia. Hal ini berakibat pula pada penggunaan metode filsafat. Nikolas Driyarkara menggunakan metode “fenomenologi eksistensialis”. Metode ini merupakan perpaduan antara metode fenomenologi dan metode eksistensialisme. Selanjutnya akan diuraikan secara singkat metode fenomenologi eksistensialis.

Alur pemikiran Nikolas Driyarkara mengarah kepada aspek sosial manusia. Manusia dilihat sebagai rekan bagi sesamanya. Oleh karena itu, dia harus membangun komunitas hidup bersama. Negara menjadi jawaban riil dari hakekat manusia sebagai *homo socius*. Situasi riil manusia ditunjukkan dalam pengalaman sehari-hari. Ini termasuk fenomen sosial. “Secara

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

fenomenologis, sosialitas manusia ditunjukkan lewat pengalaman sehari-hari. Manusia, berbeda dari binatang, senantiasa butuh sahabat dan selalu mengembangkan sosialitasnya”.⁴⁸

Pengalaman eksistensial manusia sebagai makhluk sosial juga mengantar Nikolas Driyarkara kepada pemahamannya tentang “sosialitas sebagai eksistensial”. Dia memberi penekanan pada makna sosial yang harus dihidupi oleh manusia. Maka dari itu, titik tolak pemikiran filosofis dari Nikolas Driyarkara adalah realitas setiap hari.

Dalam “sosialitas sebagai eksistensial”, kita melihat cara seorang Driyarkara menjalankan filsafatnya, secara khusus filsafat sosial. Di sini kita malah bisa melihat langkah-langkah metodologis filsafat Driyarkara. Ia mulai mengingatkan tanggung jawab filsafat agar senantiasa dekat dengan realitas dan mempertanggungjawabkan pilihannya untuk membahas realitas sosial (atau persisnya “sosialitas” manusia).⁴⁹

Di dalam metode fenomenologi eksistensial, Nikolas Driyarkara lebih menekankan pengalaman eksistensial manusia. Pengalaman eksistensial manusia dipadukan dengan fenomena yang ada. Dengan kata lain, metode fenomenologi eksistensial menampilkan kerangka berpikir yang realis. Filsafat tidak hanya berkutat seputar hal-hal yang abstrak. Sebaliknya, filsafat mesti menyentuh realitas dan berdialog dengannya.

Filsafat juga perlu mempertanggungjawabkan pilihannya untuk membahas realitas sosial. Realitas sosial menjadi titik acuan penyelidikan pengalaman eksistensial manusia. Manusia bisa mengenal pengalaman tersebut lewat fenomen-fenomen yang ditampakkan kepadanya. Nikolas Driyarkara membahas pemikiran filosofisnya dengan menggunakan metode fenomenologi eksistensial dengan maksud untuk menyelidiki fitrah sosial manusia. Dalam metode fenomenologi eksistensial, manusia menjadi sentrum dari seluruh penelitian. Manusia memiliki kepribadian yang kompleks. Penelitian atas diri manusia hanya dapat dilakukan dengan mengamati fenomen-fenomen yang tampak.

⁴⁸ A. Sudiarja dan G. Budi Subanar, *Op. Cit.*, hal. 593.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 592.

Nikolas Driyarkara memperkenalkan metodenya itu untuk menyelidiki manusia. Sosialitas manusia dapat dijadikan sampel penelitian. Ketika manusia membentuk koloni hidup bersama, di situlah dimensi sosial manusia mulai terwujud. Fenomen seperti ini bisa dijadikan acuan pembahasan kita mengenai manusia selaku makhluk sosial. Dengan bertolak dari gejala tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Metode seperti ini sangat sederhana namun mengandung kesukaran pula.

4.7 Rangkuman

Pandangan Nikolas Driyarkara tentang hidup *menegara* bertolak dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Kesosialan manusia menjadi dasar utama bagi hidup *menegara*. Dalam hidup *menegara*, manusia melibatkan diri dalam negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Maka dari itu, keberadaan masyarakat di dalam negara tidak sekadar ‘berada’ tanpa melakukan apa-apa. Keberadaan manusia dalam negara mendapat maknanya ketika dia berbuat sesuatu untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Pada bagian ini akan dibicarakan tentang hakekat negara dan makna istilah *menegara*. Ungkapan hidup *menegara* merupakan istilah teknis yang dicetuskan oleh Nikolas Driyarkara. Dia mengatakan bahwa manusia hendaknya *menegara* dan tidak sekedar *bernegara*. Dengan istilah *menegara*, Nikolas Driyarkara hendak menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Penulis juga menguraikan hubungan atau korelasi antara pemikiran Aristoteles tentang kewargaan *polis* dan pandangan Nikolas Driyarkara mengenai hidup *menegara*. Ada tiga hal yang dibahas di sini, yakni masyarakat sebagai *motor primus* kehidupan negara, partisipasi warga dan *bonum commune*.

Selain itu, penulis juga menguraikan tentang kepribadian nasional menurut Nikolas Driyarkara. Pada bagian ini, ada beberapa hal yang dibahas seperti manusia sebagai pribadi yang mempribadikan diri, manusia sebagai pribadi yang membentuk kebangsaan dan manusia

sebagai pribadi yang menghasilkan kebudayaan. Ketiga hal ini menekankan peranan manusia sebagai makhluk yang mampu mentransendensi dirinya dan alam jasmani. Manusia juga disarankan untuk terus mempribadikan dirinya. Ketika dia sudah mampu mempribadikan dirinya, maka dia bisa menciptakan kebangsaan dan menghasilkan kebudayaan. Pada bagian akhir dari tulisan ini, dijelaskan pula metode filsafat yang dicetuskan oleh Nikolas Driyarkara.